

**KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS
(Studi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa)**

Meily Meiling Lompoliuw, Marthinus Mandagi, Jetty E. H. Mokat
Program Studi Administrasi Negara FIS Unima
E-mail: meilinglompoliuw@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu : observasi, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan belum dilaksanakan sesuai SOP, c). Kepala Dinas belum melakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan, d). Kepala Dinas belum melakukan evaluasi terhadap pelayanan. Untuk itu sebaiknya: a). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan dilaksanakan sesuai SOP, c). Kepala Dinas melakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan, d). Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik.

Kata Kunci: *Tugas Pokok, Fungsi Kepala Dinas*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Suatu organisasi pada dasarnya adalah suatu bentuk kerja sama antar dua orang atau lebih. Baik yang di sebut organisasi ataupun kelompok, tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa adalah suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa kepala

dinas mempunyai tugas yaitu: 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas, mengacu pada program nasional dan daerah; 3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 5. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaiaan; 7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dijumpai beberapa situasi seperti, sikap bawahan yang tidak segan pada atasan, beberapa pegawai menunda pekerjaan, para pegawai tidak

disiplin terhadap kehadiran di hari biasa dan juga di saat rapat, sering terjadi konflik antara atasan dan bawahan, serta konflik antar sesama bawahan dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Hal seperti itu sangat memungkinkan untuk mempengaruhi kinerja dari pegawai, termasuk mempengaruhi capaian kerja dari instansi tersebut. Dalam mempertanggung jawabkan semua yang menyangkut Dinas maka faktor kepemimpinanlah yang menjadi sasarannya, karena posisi pimpinanlah yang sangat mengetahui apa yang terjadi serta juga berkemungkinan besar mengambil andil dari fenomena yang didapati oleh peneliti.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini juga terjadi peralihan pimpinan, yang semula dipimpin oleh bapak Ir. Kussoy Wailan John, MT dan sekarang di pimpin oleh bapak Nofry W. Lontaan, ST sebagai Pelaksana Tugas Harian. Banyak kejadian terjadi di instansi-instansi lain setelah penggantian atau peralihan pimpinan terjadi perubahan dengan program-program yang telah tersusun dalam rencana kerja tahunan yang seharusnya program-program yang ada tersebut masih harus dilanjutkan sampai masa rencana kerja tahunan berakhir. Karena itu, untuk melihat keberlangsungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru maka peneliti mengambil rencana kerja tahunan SKPD dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di dalamnya terdapat program-program yang dijadikan sebagai acuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama (Miftah Thoha,2010), lebih jauh lagi George R. Terry (Mifta Thoha,2010) merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk memengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa

pengertian diatas dapat dituliskan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas memengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Kiggundu (Dalam Gomes, 2003:4) Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional.

Menurut Mondy dan Noe (Dalam Gomes, 2010:3) Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut DeCenzo dan Robbins (Moekijat, 2010:2) manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses terdiri atas penerimaan, pengembangan, motivasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia.

Menurut Hasibuan (2006:10), Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Glueck (Dalam Moekijat, 2010:3) Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan dalam semua organisasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keefektifan sumber daya manusia dan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian proses yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan pegawai/sumber daya manusia dalam hubungannya dengan peranan kerja agar dapat mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintahan Daerah

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, memberikan definisi sebagai berikut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh DPRD dan Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi, dimana unsur penyelenggaraan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang menjalankan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi di Kabupaten Minahasa. Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 71 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini memiliki ketentuan umum sebagaimana yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa; 3. Bupati adalah Bupati Minahasa; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa; 5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidangnya yang selanjutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa; 7. Tugas Pembantuan adalah pengawasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan; 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga yang berkaitan erat satu sama lain dalam

melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan.

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa mempunyai tugas yaitu : 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas, mengacu pada program nasional dan daerah; 3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 5. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaiaan; 7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Keberlangsungan Program dari Kepala Dinas Lama oleh Kepala Dinas Baru

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa terjadi peralihan pimpinan, yang semula dipimpin oleh bapak Ir. Kussoy Wailan John, MT dan sekarang di pimpin oleh bapak Nofry W. Lontaan, ST sebagai Pelaksana Tugas Harian. Banyak kejadian terjadi di instansi-instansi lain setelah penggantian atau peralihan pimpinan terjadi perubahan dengan program-program yang telah tersusun dalam rencana kerja tahunan yang seharusnya program-program yang ada tersebut masih harus dilanjutkan sampai masa rencana kerja tahunan berakhir. Karena itu, untuk melihat keberlangsungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru maka peneliti mengambil rencana kerja tahunan SKPD dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di

dalamnya terdapat program-program yang dijadikan sebagai acuan. Berikut program dan kegiatan SKPD dinas PU & PR tahun 2018:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan jalan dan jembatan
7. Program pembangunan jalan dan jembatan
8. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
9. Program pembangunan turap/talud/bronjong
10. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
11. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
12. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya
13. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
14. Program peningkatan sarana dan prasarana umum
15. Program perencanaan tata ruang
16. Program pemanfaatan ruang
17. Program pengendalian pemanfaatan ruang

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Waktu Penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan akan didasarkan dengan berbagai teknik yakni, dengan wawancara, observasi, dokumentasi (triangulasi). Menurut Miles dan Huberman (1992:112) bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktifitasnya yaitu reduksi data, penyajian data

dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan 4 (empat) kriteria utama yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2000:173), guna menjamin keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Derajat Keteralihan (*Transferbility*), Derajat Ketergantungan (*Dependability*) dan Derajat Kepastian (*Confirmability*).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kepemimpinan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang menjalankan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi di Kabupaten Minahasa. Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 71 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini memiliki ketentuan umum sebagaimana yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa;
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidangnya yang selanjutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa;
7. Tugas Pembantuan adalah pengawasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa kepala dinas mempunyai tugas yaitu : 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas, mengacu pada program nasional dan daerah; 3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 5. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaiaan; 7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lokasi penelitian menunjukkan kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa belum cukup baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ada beberapa poin yang belum terpenuhi seperti yang sudah termuat pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 6 mengenai tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas. Hal ini jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan dimana dalam menjalankan kepemimpinannya pemimpin masih belum optimal dikarenakan pimpinan masih kurang tepat dalam membuat keputusan, kurang tegas serta kurang mengontrol pekerjaan dan pegawai, sehingga berdampak terhadap kinerja pegawai dan kedisiplinan yang kurang. Untuk itu pimpinan harus optimal dalam menjalankan kepemimpinannya dalam penerapan tugas pokok dan fungsinya.

Keberlangsungan Program dari Kepala Dinas yang lama oleh Kepala Dinas yang baru.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa terjadi peralihan pimpinan, yang semula dipimpin oleh bapak KJ dan sekarang di pimpin oleh bapak NL sebagai Pelaksana Tugas Harian. Banyak kejadian terjadi di instansi-instansi lain setelah penggantian atau peralihan pimpinan terjadi perubahan dengan program-program yang telah tersusun dalam rencana kerja tahunan yang seharusnya program-program yang ada tersebut masih haru dilanjutkan sampai masa rencana kerja tahunan berakhir. Karena itu, untuk melihat kesinambungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru maka peneliti mengambil rencana kerja tahunan SKPD dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di dalamnya terdapat program-program yang dijadikan sebagai acuan.

Untuk mengetahui kesinambungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan sebagai indikator, apakah program kepala dinas yang lama masih dilanjutkan oleh kepala dinas yang baru dan program-program apa saja yang masih dilanjutkan. Indikator pertanyaan tersebut sesuai dan mampu menjawab permasalahan yang peneliti temui di lapangan. Adapun indikator pertanyaan yang dipenuhi dalam menjawab apakah program kepala dinas yang lama dilaksanakan secara berkesinambungan oleh kepala dinas yang baru dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai apakah program kepala dinas yang lama masih dilanjutkan oleh kepala dinas yang baru dan program-program apa saja yang masih dilanjutkan, menunjukkan bahwa kepala dinas yang baru masih melanjutkan semua program dari kepala dinas yang lama berdasarkan rencana kerja SKPD tahunan. Berdasarkan aturan rencana kerja SKPD yang disusun memiliki jangka waktu satu tahun sehingga untuk membuat program baru harus menyelesaikan tahun yang sudah berjalan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kepala dinas yang baru

melanjutkan program dari kepala dinas yang lama secara berkesinambungan.

tersusun pada tahun yang berjalan sudah berakhir.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum optimal. Untuk itu diharapkan agar pimpinan harus lebih proaktif dalam mempengaruhi, menginspirasi, memotivasi serta menuntun aktifitas para pegawai sehingga kinerja dari pegawai akan lebih baik dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi.
2. Setiap program yang telah tersusun pada rencana kerja SKPD harus diselesaikan sampai jangka waktu yang telah ditentukan, nanti akan diadakan penyusunan program baru apabila program-program yang telah

Saran

- a. Pimpinan harus optimal dalam menjalankan kepemimpinannya dalam penerapan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pimpinan harus lebih tegas terhadap pegawai serta tegas dalam penuntasan pekerjaan.
- c. Pimpinan harus lebih melibatkan pegawai atau bawahan dalam penetapan kebijakan
- d. Pimpinan lebih memperhatikan pekerjaan dengan cara melakukan pengontrolan terhadap para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan.
- e. Pimpinan harus menunjukkan evaluasi terhadap pegawai

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gomes, F. Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi. Yogyakarta
- Handoko. 2014. *Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu SP. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Askara. Jakarta
- Moekijat. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju. Bandung
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press
- Matondang. 2008. *Kepemimpinan (Budaya Organisasi dan Manajemen Stratejik)*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. RosdaKarya. Bandung
- Mokat, Jetty. 2015. *The Leadership Style of Woman as the Head of Regency in Instructing Duties and Supervision to Subordinates*. International Journal of Humanities and Social Science Invention. Universitas Negeri Makasar
- Nawawi. 2009. *Publik Policy*. CV Putra Media Nusantara. Surabaya
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan [Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik]*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Silalahi. 2011. Ulber. *Asas-Asas Manajemen*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sugiono. 2005. *Memenuhi Penelitian Kualitatif dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

UU 1945 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PERBUP Minahasa No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Internet:

<http://e-journal.uajy.ac.id/8313/1/SNA80008.pdf>

<http://hertianuslokon.blogspot.co.id/2013/06/kepemimpinan-lurah-dalam-meningkatkan.html>
www.wikipedia.indonesia.com

<http://etalasepustaka.blogspot.co.id/2016/05/5-gaya-kepemimpinan-menurut-siagian.html>

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>

[http://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/#Menurut Para Ahli](http://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/#Menurut_Para_Ahli)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html>